



JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT (JAFM)

E-ISSN : 2721-3013
P-ISSN : 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>

Received: September 10th 2024, Revised: September 17th 2024, Publish: September 26th 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Deliana Deliana¹, Arne Frans Marhuasa Simamora², Ilham Hidayah Napitupulu³

¹Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: deliana@polmed.ac.id

²Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: arnesimamora@gmail.com

³Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: ilhamhasan77@yahoo.com

Corresponding Author: arnesimamora@gmail.com²

Abstract: *This research was aimed to know financial condition of government Sibolga for the years 2018-2022 from efficiency of PAD ratio, effectiveness of PAD ratio, expenditure compatibility ratio and Financial Dependency Ratio. The research used is analytical descriptive. The data collection techniques used in this research were field research and library research. Descriptive and ratio analysis was used to appraise efficiency of PAD ratio, effectiveness of PAD ratio, expenditure compatibility ratio and Financial Dependency Ratio. The result of this research pointed that (1) efficiency of PAD ratio of Sibolga for each year was 1,59% in average which mean efficiency of PAD was already efficient. (2) The Government of Sibolga is still less effective in managing PAD with an average effectiveness ratio of 76,20%. (3) the highest ratio results from operating expenditures is 85,89% in 2021 and the lowest ratio in 2018 is 77,58%. The highest ratio of capital expenditures to the total expenditure is 22,39% in 2018 and the lowest ratio in 2019 is 14,04%. The Government of Sibolga still prioritizes operational expenditure compared to capital expenditure.(4) Financial Dependency Ratio of Sibolga government during 2018-2022 is 83.88% categorized very high, this condition shows the dependency level of Sibolga Government is very high to the central government.*

Keyword: *The efficiency of ratio PAD, The effectiveness ratio of PAD, The expenditure compatibility ratio, Dependency Ratio*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah kota Sibolga selama tahun 2018-2022 ditinjau dari rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian dan rasio ketergantungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif dan analisa rasio untuk menghitung rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio keserasian dan rasio ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rasio efisiensi kota Sibolga mencapai rata-rata 1,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efisien. (2) Pemerintah daerah Kota Sibolga masih kurang efektif dalam mengelola PAD dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 76,20%. (3) rasio tertinggi keserasian belanja operasi sebesar 85,89% pada tahun 2021 dan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 77,58%, rasio belanja modal

terhadap total belanja tertinggi sebesar 22,39% yaitu pada Tahun 2018 dan rasio terendah pada Tahun Anggaran 2019 yaitu 14,04%. Pemerintah Kota Sibolga masih memprioritaskan Belanja Operasional dibandingkan dengan Belanja Modal. (4) Rasio Ketergantungan kota Sibolga selama tahun 2018- 2022 rata-rata 83,88% dikategorikan sangat tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan kota Sibolga masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Kata Kunci: Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kecerahan Belanja, rasio Ketergantungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan berasaskan desentralisasi fiskal (Indriani, Lestari & Triani, 2020). Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya (Moridu, 2021). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dimana Presiden juga menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). APBD dapat menggambarkan upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsi belanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparat pemerintah atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah (Sari dan Yousida, 2019). Salah satu alat dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan adalah rasio karena dapat menunjukkan hubungan antara data-data keuangan yang akan memberikan gambaran yang baik tentang kondisi keuangan. Dengan mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan, maka akan diketahui pula kapabilitas pemerintah daerah tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, *generate* pendapatan, menyediakan dan memelihara kualitas layanan publik, meningkatkan sumber daya keuangan, serta membiayai kegiatan operasional pemerintahan secara mandiri. Selanjutnya tentu saja diharapkan pemerintah daerah dapat makin meningkatkan *awareness* terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terkait secara langsung dengan pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Pemerintah daerah yang secara pasti mengetahui dan memahami kondisi keuangannya, sudah sepatutnya mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan langkah-langkah yang konkret demi mewujudkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sedemikian rupa sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

Analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengukur ketercapaian pengelolaan keuangan yang telah diamanahkan oleh rakyat. Pertanggungjawaban kinerja keuangan menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan tersebut. Penilaian kondisi keuangan daerah tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap hasil dari kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dianggarkan dan direalisasikan (Halim, 2004 dalam Malik, 2022).

Rasio keuangan merupakan alat yang lebih sederhana untuk mengukur dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat tentang isi dari laporan keuangan. Interpretasi atas hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat perbedaannya.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah Indriani, Iestari dan Triani (2020), Kanoli (2023), Mataris dan Digdowiseiso (2022), Palupi, Riyanti dan Wahyudi (2022), Malik (2022), Keintjem dan Sri Murni (2022), Gultom, Sinurat dan Damanik (2020) memperlihatkan bahwa begitu pentingnya untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara lebih mendalam. Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pihak luar untuk menciptakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang turut menyelenggarakan otonomi daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat ditinjau dari strategi pemerintah daerah dalam mengatur administrasi, menggali potensi daerah, menyusun, mengelola, serta melaporkan penggunaan keuangan. Selain itu, besarnya kontribusi masyarakat dalam melunasi pajak dan retribusi yang menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Peningkatan PAD dapat mengurangi ketergantungan pada sumbangan Pemerintah Pusat/Provinsi sehingga Pemerintah Daerah cukup berperan dalam menanggung sendiri berbagai aktivitas pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur.

Mengingat pentingnya menganalisa kondisi keuangan dalam suatu pemerintahan dan rendahnya PAD yang diterima oleh kota Sibolga, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait Kondisi Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Sibolga menggunakan rasio efisiensi PAD rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian, dan rasio ketergantungan untuk

mengetahui tingkat kinerja yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang tepat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Sibolga, menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga periode 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang melakukan perhitungan terhadap informasi keuangan untuk memecahkan permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain (Sugiyono, 2012). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (*Quantitative Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable dengan menggunakan data yang terbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2011). Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam STPK yang terdiri dari Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Ketergantungan untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: Penelitian Lapangan (*field research*), Penelitian Kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diakses dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, dan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga tahun 2018-2022 yang telah audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jenis laporan yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis rasio. Analisis Rasio keuangan pada penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang terdiri dari Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Ketergantungan untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022. Sumber data berasal dari Laporan realisasi Anggaran (LRA) Pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sibolga selama tahun 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Laporan Realisasi Anggaran

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Tahun 2018-2022 yang didapat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun 2018-2022. Laporan ini digunakan untuk mendapat data APBD, anggaran PAD, realisasi PAD, anggaran biaya pemungutan PAD, realisasi pemungutan APBD, anggaran dan realisasi Belanja Daerah.

Laporan realisasi anggaran pemerintah kota sibolga pada tahun 2018-2029 sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	81.245.733.811,60	69.312.217.832,16	79.539.316.412,03
Pendapatan Transfer	512.639.624.901,00	526.877.503.073,00	525.379.250.738,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.152.440.000,00	14.256.280.000,00	12.403.273.154,00
Belanja Operasi	493.614.259.884,61	499.075.972.245,64	459.170.613.675,09
Belanja Modal	142.467.823.362,00	81.569.259.159,00	86.041.237.376,00
Belanja Tak Terduga	175.373.635,00	438.630.000,00	23.071.483.319,00

Transfer	481.519.635,00	180.254.642,00	141.012.566,00
Pembiayaan Netto	28.760.673.122,63	14.806.771.307,05	38.469.824.145,57
SILPA	14.389.161.293,62	43.988.656.165,57	87.367.317.513,51

Laporan realisasi anggaran pemerintah kota sibolga pada tahun 2021-2022 sebagai berikut

:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2019-2022

Uraian	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	76.263.787.133,27	82.398.151.034,31
Pendapatan Transfer	498.640.755.756,00	534.079.114.254,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.756.675.700,00	4.805.574.307,32
Belanja Operasi	481.221.646.923,13	555.581.327.681,84
Belanja Modal	87.104.769.378,26	141.684.605.852,00
Belanja Tak Terduga	12.993.115.700,00	12.600.415.139,00
Transfer	0,00	75.000.000,00
Pembiayaan Netto	84.287.140.918,51	175.814.578.217,39
SILPA	92.628.827.506,39	87.156.069.140,18

Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit. Analisis rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Malik, 2022). Hasil dari analisis rasio keuangan tersebut yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kondisi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah.

1. Kondisi Keuangan Pemerintah Sibolga Tahun 2018-2022 Berdasarkan Rasio Efisiensi PAD

Menurut Mataris dan Digidowiseiso (2022), rasio efisiensi dimaksudkan untuk menggambarkan dan menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Labi, 2019). Menghitung rasio efisiensi dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria Rasio Efisiensi PAD ialah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Persentase Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: (Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Gultom et. al., 2020)

Rasio efisiensi dihitung dengan menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD setiap tahun, menjumlahkan komponen-komponen realisasi setiap tahun kemudian membagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi PAD. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD ialah belanja rutin untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang jasa. Belanja pegawai terdiri belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan setiap tahun melalui peraturan walikota. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan

sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi (PP nomor 69 Tahun 2010) sedangkan belanja barang adalah pengeluaran anggaran pada setiap kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dimana kegiatan ini dikelola di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) kota sibolga dalam kurun waktu 2018 hingga 2022.

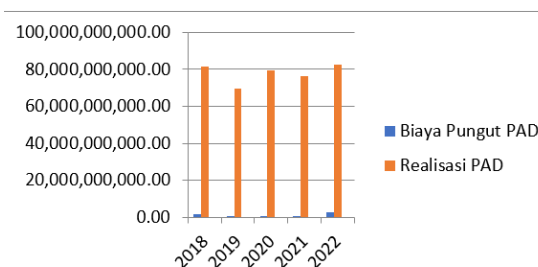
Berdasarkan rumus menghitung rasio efisiensi di atas, maka dapat di diketahui tingkat efisiensi PAD sebagai berikut dalam tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Rasio Efisiensi PAD Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Biaya Pungut PAD (Rp)	Realisasi Pad (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2018	1,498,980,505.00	81,245,733,811.60	1.84%	Sangat Efisien
2019	827,573,600.00	69,312,217,832.16	1.19%	Sangat Efisien
2020	477,076,200.00	79,539,316,412.03	0.60%	Sangat Efisien
2021	731,775,600.00	76,263,787,133.27	0.96%	Sangat Efisien
2022	2,744,633,611.00	82,398,151,034.31	3.33%	Sangat Efisien

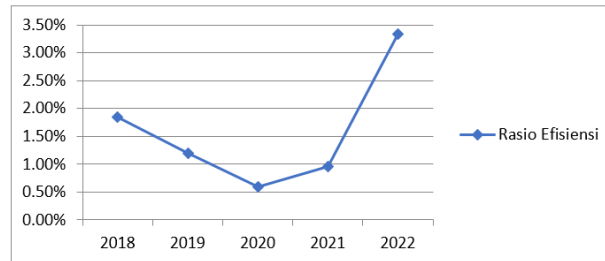
Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 hingga tahun 2022, Rasio Efisiensi PAD kurang dari 60% sehingga masuk kategori sangat efisien. Pada tahun 2018, rasio efisiensi sebesar 1,84% menunjukkan kinerja pemerintah kota sibolga dalam memungut PAD sangat efisien. Pada tahun 2019 biaya pungut mengalami penurunan dengan dihapuskannya insentif pemungutan pajak dan retribusi, namun hal ini diikuti dengan turunnya realisasi PAD yang dipengaruhi turunnya penerimaan bagian laba dari BUMD. Rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 1.19% menunjukkan bahwa pemungutan PAD lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, biaya pungut kembali turun karena adanya penghematan belanja akibat pandemi COVID-19, namun PAD naik dibanding tahun 2019 akibat naiknya penerimaan bagian laba dari BUMD. Biaya Pungut yang turun namun realisasi PAD naik mengakibatkan rasio efisiensi berada pada nilai 0,60%, lebih efisien dibanding tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2021, rasio efisiensi sebesar 0,96% masih kategori sangat efisien namun lebih tidak efisien dibanding tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, rasio efisiensi sebesar 3,33% masuk kategori sangat efisien. Tahun 2022 menjadi tahun dengan rasio tertinggi sehingga menjadi tahun dengan paling tidak efisien dalam memungut PAD jika dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena naiknya biaya pungut secara signifikan pada kegiatan PAD dan juga dengan dianggarkannya kembali insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Rasio efisiensi PAD terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,60%. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD (Mahmudi, 2010). Maka dapat diketahui pemungutan PAD yang paling efisien terjadi di tahun 2020. Sedangkan rasio efisiensi PAD terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,33%. Meski biaya pemungutan PAD tertinggi terjadi pada 2022, namun Rasio tersebut masih dalam kategori sangat efisien karena berada dalam rentang kurang dari 60%. Pada tahun yang sama Kota Sibolga juga mendapatkan penerimaan PAD tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp.82,398,151,034.31.



Gambar 1. Perbandingan Biaya Pungut PAD dan Realisasi PAD

Pada Gambar 1 dapat dilihat terjadi pelonjakan pada rasio efisiensi di tahun 2022. Hal ini dikarenakan terjadi pelonjakan biaya pemungutan PAD di tahun 2022 dan juga adanya kenaikan PAD. Biaya pungut PAD yang mengalami peningkatan yang signifikan terdapat pada Biaya insentif pemungutan pajak daerah, kegiatan penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.



Gambar 2. Grafik Rasio Efisiensi PAD Tahun 2018-2022

Walaupun terjadi fluktuasi efisiensi sepanjang tahun 2018-2022 dan terjadi pelonjakan di tahun 2022, namun fluktuasi rasio efisiensinya masih dalam rentang aman karena di bawah rentang < 60%. Untuk mempertahankan efisiensi keuangan daerah tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi berkala secara konsisten terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam pemungutan PAD. Berdasarkan rata-rata rasio efisiensi PAD dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Pemerintah berhasil mempertahankan efisiensi PAD dalam kategori sangat efisien selama 5 tahun berturut dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 1.59%. Rata-rata rasio efisiensi masih sangat jauh dibawah batas kriteria efisiensi yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yaitu kurang dari 60%. Kondisi ini dapat jadi pertimbangan bagi pemerintah kota Sibolga untuk menaikkan biaya pungut PAD untuk dapat mendorong kenaikan realisasi PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika dan Kusuma (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Malik (2022) terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tarakan Tahun 2009-2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2009-2019 berdasarkan tingkat efisiensi termasuk dalam kriteria tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 108%.

2. Kondisi Keuangan Pemerintah Sibolga Pada Tahun 2018-2022 Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah adalah kemampuan pemerintah untuk mencapai pendapatan awal daerah yang diproyeksikan terhadap target yang telah ditentukan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Pangkey et al., 2017 dalam Palupi et.al., 2022). Menghitung rasio efektivitas dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dalam menentukan efektif atau tidaknya keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Sangat Efektif

90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

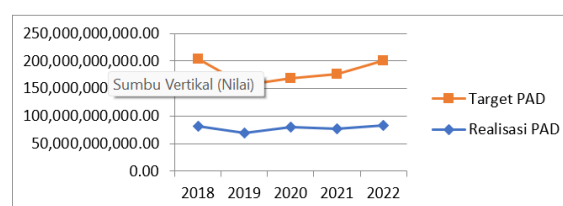
Rasio efektifitas PAD dihitung dengan menjumlahkan komponen-komponen realisasi PAD pemerintah kota Sibolga dari tahun 2018 hingga tahun 2022, menjumlahkan komponen-komponen target penerimaan PAD tahun 2018 hingga tahun 2022 kemudian membagi realisasi PAD dengan target penerimaan PAD. Berdasarkan rumus menghitung rasio efektifitas di atas, maka dapat di ketahui tingkat efektifitas PAD sebagai berikut:

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pad (Rp)	Target Pad (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2018	81,245,733,811.60	122,338,287,031.58	66.41 %	Kurang Efektif
2019	69,312,217,832.16	87,568,068,437.97	79.15 %	Kurang Efektif
2020	79,539,316,412.03	88,936,953,076.09	89.43 %	Cukup Efektif
2021	76,263,787,133.27	99,452,144,127.28	76.68 %	Kurang Efektif
2022	82,398,151,034.31	118,845,979,568.48	69.33 %	Kurang Efektif

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efektifitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan dari tahun 2018-2022 masih dalam kategori kurang efektif karena berada pada rentang 60%-80%, pada tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 66,41% menunjukkan tingkat efektifitas PAD masih kurang efektif. Pada tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 79,15%, naik dibanding tahun 2018, namun masih dalam kriteria kurang efektif. Realisasi PAD turun dibanding tahun 2018, namun diikuti dengan turunnya target PAD yang cukup signifikan pada komponen lain-lain PAD yang sah lainnya sehingga rasio efektifitas masih lebih baik. Pada tahun 2020 rasio efektifitas sebesar 89,43% masuk dalam kriteria cukup efektif. Hal ini menunjukkan efektifitas PAD lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi PAD naik signifikan bersumber dari pengelolaan BLUD dan bagian hasil laba BUMD. Rasio efektifitas pada tahun 2021 turun dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 76,68% masuk dalam kriteria kurang efektif. Rasio turun akibat turunnya realisasi PAD dan naiknya target PAD. Pada tahun 2022, rasio efektifitas kembali turun menjadi 69,33%. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PAD mencapai angka tertinggi yaitu sebesar Rp. 82,398,151,034.31 namun target PAD yang ditetapkan tidak kalah tinggi pula. Target PAD pada tahun 2022 merupakan tertinggi kedua setelah target PAD 2018, yaitu sebesar Rp.118,845,979,568.48, sehingga rasio efektifitas dinilai masih kurang efektif. Realisasi PAD naik pada komponen pendapatan BLUD dan bagian laba BUMD, sementara target PAD naik pada komponen Pendapatan BLUD dan lain-lain PAD yang sah. Rata-rata rasio efektifitas PAD dalam rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 76,20% dimana tahun 2020 menjadi tahun dengan efektifitas tertinggi dan tahun 2018 tahun dengan efektifitas terendah.

Berikut adalah gambar perbandingan realiasi PAD dan target PAD kota Sibolga dari tahun 2018 hingga tahun 2022:



Gambar 3. Perbandingan Realisasi PAD dengan Target PAD

Pada gambar diatas dapat dilihat Realisasi PAD dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak pernah mencapai target, namun target PAD cenderung naik. Target lain-Lain PAD yang sah lainnya pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp13.826.347.684,98 dengan pencapaian Rp3.486.163.064,86 atau 25,21%, namun ditahun 2020 target lain-lain PAD yang sah lainnya justru naik sebesar 48,80% menjadi Rp20.573.107.758,09 dengan persentase pencapaian target hanya 12.41%. Sejalan dengan kondisi penetapan target lain-lain PAD yang sah, pada tahun 2020 target penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah ditetapkan sebesar Rp39.475.148.805,78 dengan pencapaian Hanya 5,25%, namun target penerimaan ini justru naik menjadi Rp40.815.723.704,00 dengan realisasi hanya 4,62%. Penerimaan Pendapatan BLUD pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan, dimana dari target sebesar Rp34.000.000,00 terealisasi sebesar Rp42.086.351.531,00 atau 123,78% namun ditahun berikutnya target penerimaan pendapatan BLUD turun menjadi Rp28.000.000.000,00. Pada Tahun 2022, Target retribusi pelayanan pasar naik sebesar 379% dari tahun 2021 yaitu dari Rp1.674.498.500 menjadi Rp8.028.600.500,00 sementara realisasi turun sebesar 6,88%. Target ditetapkan naik ketika pengelolaan retribusi pasar belum diserahkan dari pemerintah pusat setelah dilaksanakannya pembangunan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sibolga dalam menetapkan target PAD masih belum menyesuaikan dengan kemampuannya untuk merealisasikan target PAD tersebut.

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Rasio Efektivitas	% Selisih Tidak Tercapai
	X	Y (100%-X)
2018	66.41%	33.59%
2019	79.15%	20.85%
2020	89.43%	10.57%
2021	76.68%	23.32%
2022	69.33%	30.67%

Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas PAD dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Pemerintah daerah Kota Sibolga masih kurang efektif dalam mengelola keuangan daerahnya dengan perolehan rata-rata rasio efektivitas sebesar 76,20% dimana dalam rentang 60%-80% yang masuk dalam kriteria kurang efektif. Pemerintah kota Sibolga harus menerapkan target secara berjenjang tahun ke tahun untuk mencapai kondisi efektifitas PAD yang efektif. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang dituju, pemerintah dapat melakukan penyesuaian penetapan target dengan kemampuan daerah yang riil, dan pengoptimalan perolehan PAD melalui sumber penerimaan yang diunggulkan seperti pajak restoran dan pajak bumi bangunan serta menggali sumber sumber penerimaan baru yang potensial.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pundiising dan Pagi (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Toraja tahun anggaran 2017-2019 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong kurang efektif dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 76,93%. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mataris dan Digdowiseiso (2022) mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2019 di lihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, efisiensi keuangan daerah dan keserasian belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Penelitian Keintjem dan Sri Murni (2022) terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggal Laut Tahun 2017-2019 dengan hasil peneltian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD yang diperoleh sudah sangat efektif dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 106,92%.

3. Kondisi Keuangan Pemerintah Sibolga Pada Tahun 2018-2022 Berdasarkan Rasio Kecerasian

Menurut Malik (2022), Rasio Kecerasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Terdapat dua perhitungan yang digunakan dalam rasio ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Deswira, 2022).

A. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi menampilkan informasi pada pengguna laporan untuk mengetahui besarnya alokasi belanja yang didistribusikan untuk belanja operasi (Mahmudi 2010 dalam Rahmsari dan Wuryani, 2021). Menghitung rasio belanja operasi dapat dilakukan dengan rumus berikut

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kecerasian belanja keuangan daerah dapat menggggunkan indikator kecerasian pada tabel berikut:

Tabel 8. Kriteria Kecerasian Belanja Operasi

Rasio Kecerasian Belanja (%)	Kecerasian Belanja Daerah Otonom Kemampuan Keuangan
0 – 20	Tidak Serasi
> 20 - 40	Kurang Serasi
> 40 - 60	Cukup Serasi
> 60 - 80	Serasi
> 80 - 100	Sangat Serasi

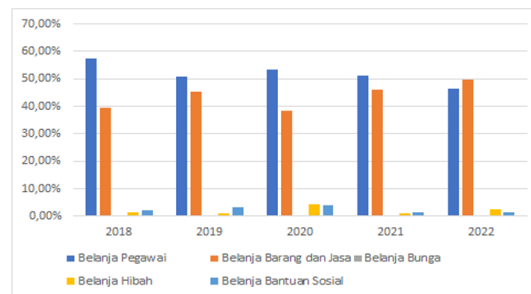
Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa secara teoritis Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkatnya rendah. Merujuk pada rumus diatas, maka diperoleh perhitungan rasio kecerasian pada belanja operasi sebagai berikut :

Tabel 9. Rasio Belanja Operasi Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio Kecerasian	Keterangan
2018	493,614,259,884.61	636,257,456,881.61	77.58 %	Serasi
2019	499,075,972,245.64	581,083,861,404.64	85.89 %	Sangat Serasi
2020	459,170,613,675.09	568,283,334,370.09	80.80 %	Sangat Serasi
2021	481,221,646,923.13	581,319,532,001.39	82.78 %	Sangat Serasi
2022	555,581,327,681.84	709,941,348,672.84	78.26 %	Serasi

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 9 menunjukkan secara umum belanja daerah kota sibolga dari tahun 2018 hingga 2022 berada diangka 550 milyar rupiah. Rasio kecerasian belanja operasi pada tahun 2018 berada pada kategori serasi dengan rasio 77,58%. Realisasi belanja operasional pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,11% atau sebesar Rp499.075.972.245,64 dari tahun 2018 yang sebesar Rp493.614.259.884,61. Total belanja daerah pada tahun 2019 turun menjadi Rp581.083.861.404,64 sehingga rasio kecerasian belanja operasi naik menjadi 85,89% dan masuk kriteria sangat serasi. Realiasi belanja operasi pada tahun 2020 turun 8% dibanding tahun 2019 menjadi sebesar Rp459.170.613.675,09. Penurunan realisasi belanja operasi juga diikuti penurunan total belanja daerah sebesar 2,20%

sehingga rasio keserasian belanja operasi turun menjadi 80,80% namun masih dalam kriteria sangat serasi. Realiasi belanja operasi pada tahun 2021 naik 4% dibanding tahun 2020 menjadi sebesar Rp481.221.646.923,13. Kenaikan realisasi belanja operasi juga diikuti kenaikan total belanja daerah sebesar 2,29% sehingga rasio keserasian belanja operasi naik menjadi 82,78% masih dalam kriteria sangat serasi. Realisasi belanja operasional pada tahun 2022 meningkat sebesar 15,45% atau sebesar Rp555.581.327.681,84 dari tahun 2021 yang sebesar Rp481.221.646.923,13. Total belanja daerah pada tahun 2022 naik cukup signifikan sebesar 22,13% sehingga rasio keserasian belanja operasi turun menjadi 78,26% dan masuk kriteria serasi. Rasio keserasian belanja operasional tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan yang terendah pada tahun 2018. Secara rata-rata, rasio keserasian belanja operasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sebesar 81,06% dan masuk kriteria sangat serasi.



Gambar 4. Komposisi Belanja Operasi Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Gambar 4 diatas menunjukkan komposisi belanja operasi pemerintah kota sibolga pada tahun 2018-2022. Belanja pegawai menjadi belanja dengan persentase terbesar dengan rata-rata 51,79% setiap tahunnya. Kemudian belanja barang dan jasa menjadi belanja dengan persentase terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 43,69%.

B. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal menampilkan informasi pada pengguna laporan untuk memahami besarnya alokasi belanja yang didistribusikan untuk pendanaan dalam wujud belanja modal pada periode tahun anggaran berkaitan. Belanja modal adalah belanja yang bersifat jangka menengah dan panjang yang juga bersifat rutin (Mahmudi 2010 dalam Rahmasari, 2021). Menghitung rasio belanja modal dapat dilakukan dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan keserasian belanja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Kriteria Keserasian Belanja Modal

Rasio Keserasian Belanja (%)	Keserasian Belanja Daerah Otonom Kemampuan Keuangan
0 – 20	Tidak Serasi
> 20 - 40	Kurang Serasi
> 40 - 60	Cukup Serasi
> 60 - 80	Serasi
> 80 - 100	Sangat Serasi

Merujuk pada rumus diatas, maka diperoleh perhitungan rasio keserasian pada belanja operasi sebagai berikut:

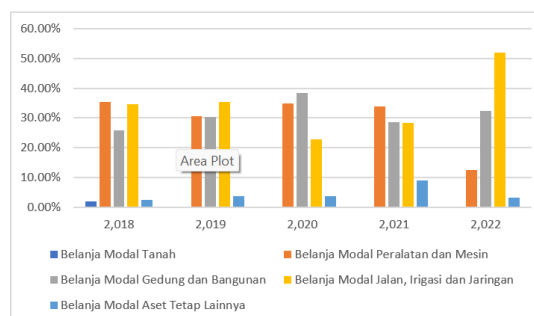
Tabel 11. Rasio Belanja Modal Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Keserasian	Keterangan
-------	-------------------------------	---------------	------------------	------------

2018	142,467,823,362	636,257,456,881.61	22.39%	Kurang Serasi
2019	81,569,259,159	581,083,861,404.64	14.04%	Tidak Serasi
2020	86,041,237,376	568,283,334,370.09	15.14%	Tidak Serasi
2021	87,104,769,378	581,319,532,001.39	14.98%	Tidak Serasi
2022	141,684,605,852	709,941,348,672.84	19.96%	Tidak Serasi

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan porsi belanja daerah pemerintah Kota Sibolga dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Rasio belanja modal pada tahun 2018 sebesar 22,39% sehingga masuk kriteria kurang serasi. Realisasi belanja modal tahun 2019 turun sebesar 42,75% dibanding tahun sebelumnya sehingga rasio belanja modal turun menjadi 14,04% dengan kriteria tidak serasi. Realisasi belanja modal tahun 2020 naik 5,48% dan total belanja turun sebesar 2,20% sehingga rasio belanja modal naik menjadi 15,14% namun masih dalam kriteria tidak serasi. Realisasi belanja modal tahun 2021 kembali naik sebesar 1,24% namun total belanja juga mengalami peningkatan sehingga rasio belanja modal turun menjadi 14,98% dan masih berada dalam kriteria tidak serasi. Realisasi belanja modal pada tahun 2022 naik sangat signifikan sebesar 62,66% diikuti total belanja daerah yang naik cukup signifikan sebesar 22,13% sehingga rasio belanja modal naik menjadi 19,96% tetapi masih dalam kriteria tidak serasi. Kenaikan total belanja daerah dan belanja modal pada tahun 2022 karena adanya sumber pembiayaan baru berupa pinjaman dari lembaga bukan bank dimana pinjaman tersebut dialokasikan ke belanja modal. Rata-rata rasio belanja modal pemerintah kota Sibolga dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar 17.30% dengan kriteria tidak serasi. Rasio belanja modal terendah terjadi pada tahun 2019 dengan rasio 14.04% dan tertinggi pada 2018 dengan rasio 22.39%.

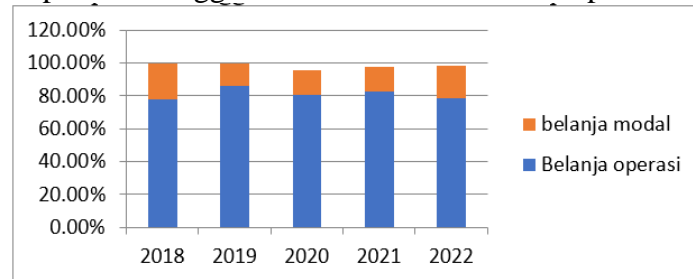


Gambar 5. Komposisi belanja modal pemerintah kota Sibolga tahun 2018-2022

Gambar diatas menunjukkan komposisi belanja modal pemerintah kota sibolga pada tahun 2018-2022. Belanja jalan irigasi dan jaringan menjadi belanja dengan persentase terbesar dengan rata-rata 34,55% setiap tahunnya. Jalan, irigasi, dan jaringan biasanya merupakan aset infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja gedung dan bangunan menjadi belanja dengan persentase terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 31,14%.

Berdasarkan proporsi alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Sibolga masih memprioritaskan Belanja Operasi jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sedangkan belanja adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi antara lain Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Pemerintah kota Sibolga harus mengalokasikan belanja modal lebih baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan pelayanan daerah kepada publik mengingat belanja modal menghasilkan aset infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kualitas pelayanan publik yang baik akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah, yang akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah tercapai



Gambar 6. Perbandingan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal

Rasio keserasian bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk dibelanjakan pada perangkat daerah dan pelayanan publik daerah. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja daerah, maka semakin rendah persentase belanja layanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat (Mahsun, 2006 dalam Palupi et.al., 2022). Dalam hal ini artinya belanja daerah pemerintah Kota Sibolga lebih diprioritaskan pada belanja operasional perangkat daerah dibandingkan alokasi belanja pada penyediaan sarana dan prasana ekonomi masyarakat.

Alokasi belanja pegawai yang tinggi dan alokasi belanja modal yang rendah pada pemerintah kota sibolga dalam rentang tahun 2018-2022 menjadi tantangan mengingat diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Pemerintah daerah yang belum memenuhi persentase diatas diberi waktu selama lima tahun sejak penetapan UU HKPD untuk melakukan penyesuaian besaran persentase belanja terhadap APBD.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mataris dan Digidowiseiso (2022) mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2019 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%. Pemerintah Kabupaten Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang. Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Malik (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Kota Tarakan Tahun 2009-2019 berdasarkan Rata-rata rasio keserasian belanja operasi sebesar 22,73%, sedangkan rasio keserasian belanja modal sebesar 34,67%. Yang artinya alokasi belanja daerah lebih diprioritaskan pada belanja modal daripada belanja operasional daerahnya.

C. Kondisi Keuangan Pemerintah Sibolga Pada Tahun 2018-2022 Berdasarkan Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Susilawati, 2018). Berikut untuk perhitungan atas rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ketergantungan menurut Kepmendagri No. 690.900.327/ 1996 ialah sebagai berikut:

Tabel 12. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0-10%	Sangat Rendah
10%-20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup
40% - 50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber:

(Kepmendagri No. 690.900.327/ 1996

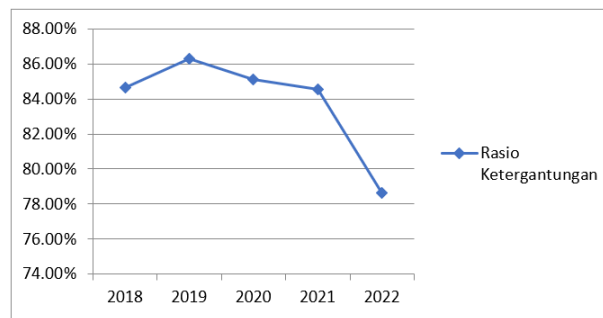
Merujuk pada rumus diatas, maka diperoleh perhitungan rasio keserasian pada belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Penerimaan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2018	526,969,290,876	622,367,464,687.60	84.67%	Sangat Tinggi
2019	526,877,503,073	610,446,000,905.16	86.31%	Sangat Tinggi
2020	525,379,250,738	617,321,840,304.03	85.11%	Sangat Tinggi
2021	498,640,755,756	589,661,218,589.27	84.56%	Sangat Tinggi
2022	534,079.114.254	621,282,839,595.63	85.96%	Sangat Tinggi
RATA-RATA			85.32%	Sangat Tinggi

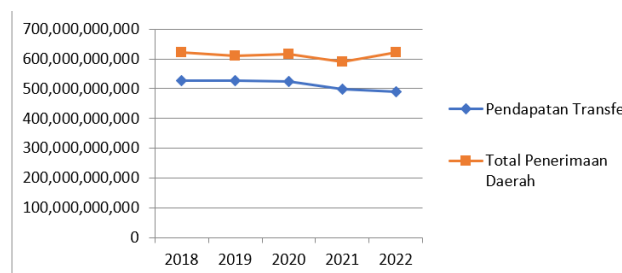
Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp526,969,290,876 dan total pendapatann sebesar Rp622,367,464,687.60 sehingga rasio ketergantungan sebesar 86,47% dan masuk kriteria sangat tinggi. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2019 cenderung stangan dibanding 2018 namun total penerimaan daerah turun pada komponen PAD sehingga rasio ketergantungan naik menjadi 86,31% dan masuk kriteria sangat tinggi. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2020 turun 0,28% menjadi Rp525,379,250,738 dan total penerimaan daerah naik sebesar 1,13% sehingga rasio ketergantungan turun menjadi 85.11% namun masih dalam kategori sangat tinggi. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2021 mengalami penurunan pada komposisi Dana Alokasi Khusus dan penerimaan daerah secara total juga turun. Rasio ketergantungan pada tahun 2021 sebesar 84,56% dan masuk kriteria sangat tinggi. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2022 naik 7,11% akibat naiknya alokasi DAK sebesar 83,88% dan total penerimaan juga naik sebesar 5,36%. Rasio ketergantungan tahun 2022 naik menjadi 85,96% dan masih dalam kriteria sangat tinggi.

Rasio ketergantungan menunjukkan ketergantungan pemerintah Kota Sibolga berada pada kriteria Sangat Tinggi diatas 50% dari tahun 2018 sampai dengan 2022, dengan rata-rata 83,86%. Trend rasio ketergantungan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berfluktuasi. Ketergantungan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 86,31% disusul tahun 2020 sebesar 85,11% dan rasio terendah pada tahun 2021 (84,56%).



Gambar 6. Grafik Rasio Ketergantungan Kota Sibolga Tahun 2018-2022

Berdasarkan dari data transfer dan total penerimaan daerah maka dapat terlihat bahwa dana transfer yang diterima dari tahun 2018-2020 cenderung tetap berada pada angka 500 miliar. Pendapatan transfer turun pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 penerimaan daerah meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (2021) pada komposisi dana alokasi khusus.



Gambar 7. Perbandingan Pendapatan Transfer dan Penerimaan Daerah

Berdasarkan rata-rata rasio ketergantungan dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Pemerintah daerah Kota Sibolga masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerahnya dengan angka rata-rata rasio ketergantungan sebesar 85,32%. Kondisi ini mencerminkan peranan pemerintah pusat lebih dominan pada keuangan kota Sibolga. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi disebabkan belum optimalnya kota Sibolga dalam menggali dan mengelola potensi PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer serta dipengaruhi oleh masih rendahnya kontribusi PAD. Sejalan dengan strategi efektifitas PAD, Pemerintah kota Sibolga juga harus menetapkan target ketergantungan secara berjenjang setiap tahunnya, sehingga ketergantungan dapat dikurangi setiap tahunnya hingga mencapai kemandirian keuangan yang ideal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dengan hasil penelitian Kanoli (2023) tentang kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Buol masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendalinya. Penelitian Melmabessy (2022) tentang Kinerja Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapuraditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. Hasil Penelitian menunjukan bahwa rata-rata Rasio ketergantungan selama tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 83,10% artinya pemerintah daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 berdasarkan rasio efisiensi PAD masuk dalam kriteria sangat efisien. Pemerintah daerah berhasil mempertahankan angka tersebut dalam kategori sangat efisien selama 5 tahun berturut. Kondisi

keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 berdasarkan rasio efektivitas tergolong pada kriteria kurang efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah masih belum mampu menyesuaikan target PAD yang ditetapkan dengan kemampuannya untuk merealisasikan target PAD tersebut. Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 berdasarkan rasio keserasian belanja operasi menunjukkan tingkat keserasian yang sangat tinggi dan tingkat rasio belanja masuk dalam kriteria tidak serasi. Rasio belanja operasi lebih besar dari pada rasio belanja modal, artinya pemerintah daerah Kota Sibolga lebih diprioritaskan pada alokasi belanja operasional perangkat daerah dibandingkan alokasi belanja pada penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Kondisi keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Ketergantungan masuk dalam kriteria ketergantungan sangat tinggi.

REFERENSI

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72-88.
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 12-17.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175-182.
- Kanoli, A. D. S., & Zuhroh, S. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(8), 1009-1017.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23-34.
- Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. CV BUDI UTAMA
- Keintjem, V. A., & Murni, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(1), 953-962.
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Volume 5 No.1.
- Laksmiwati, N. K. S., & Yudianto, I. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 268-287.
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24-33.
- Malik, A. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2009-2019. *AKUNTABEL*, 19(2), 482-490.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 7(2).
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32-46.

- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2019. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 1.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10-15.
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90-97.
- Palupi, D., Dassaad, D., Riyanti, R., & Wahyudi, B. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1819-1832.
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 11-27.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 410-415.
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1).
- Rahmasari, A. G. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3), 77-86.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897-1913.
- Ritonga, I. T. (2014). DEVELOPING A MEASURE OF LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL CONDITION. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 29(2).
- Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 96-111
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. (2019). *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 20-39.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas* (Vol. 4, No. 1, pp. 408-425).
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1).
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.
- Susilawati, D., Wardana, L. K., & Rahmawati, I. F. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91-98.